

Implementasi Program Prokebaya terhadap Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Lilis Hariyana¹, Muhammad Rachmadani Tarmiji², Enos Paselle³

¹²³Universitas Mulawarman

lilishariyana@gmail.com¹, rmdnimuhammad@gmail.com²,

epaselle1974@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of this study was to ascertain how the probabaya development program was implemented in Samarinda City's Sungai Kunjang District. Descriptive qualitative research is the type of this study. The information assortment strategies utilized are purposive examining and unplanned inspecting. Research on Tori Marilee S's policy implementation indicators is used to evaluate the Prokebaya Program's development implementation in Samarinda City's Sungai Kunjang District. Grindle, specifically the policy's content and setting in which it will be implemented. This study's findings demonstrate that the implementation of the probabaya program is crucial to efforts to develop and improve the RT environment, particularly in relation to the existing infrastructure. The community is very aware of the program's advantages, which are significant. Through citizen consultation, decision-making is completely left to the community, and the community is heavily involved in its implementation by paying close attention to the relevant rules and regulations.

Keywords: development; program; community empowerment

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pengembangan Prokebaya dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Pemeriksaan semacam ini bersifat subjektif. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah pemeriksaan sengaja dan pemeriksaan tidak sengaja. Penelitian Tori Marilee S. berfokus pada dampak Program Prokebaya terhadap pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Isi kebijakan dan konteks implementasi merupakan indikator implementasi kebijakan Grindle. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Prokebaya memegang peranan penting dalam upaya pengembangan dan perbaikan, khususnya terkait dengan infrastruktur yang ada di lingkungan RT. Manfaat program Prokebaya sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan sangat signifikan. Pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui rembug warga namun dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku dan sangat melibatkan partisipasi warga masyarakat didalam pelaksanaannya.

Kata kunci: pembangunan; program; pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pengaturan tersebut maka pemerintahan teritorial menjalankan kekuasaan luar biasa yang disebut dengan desentralisasi. Undang-

undang ini diundangkan dengan tujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus wilayahnya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Sebab, Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mengetahui potensi daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Agar dapat efektif dan memberikan dampak yang berarti dan merata bagi masyarakat ketika memasuki tahap pelaksanaan, maka pembangunan berwawasan lingkungan hidup, sebagai pelaksana pembangunan daerah, harus diawali dengan perencanaan yang matang baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan, pembangunan ini merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, konsep program unggulan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah hukumnya.

Hal ini mengharuskan bagi setiap pimpinan daerah untuk membuat regulasi atau aturan yang menjadi landasan dalam menjalankan program tersebut sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat didalam pelaksanaan nya. Permintaan masyarakat umum tidak dapat diterima tanpa adanya standar hukum yang jelas. Eksekusi pendekatan diyakini akan memiliki keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga kemajuan dalam memberikan hasil dan hasil dapat sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum. Pemerintah Daerah mengontrol standar yang sah sebagai Pedoman pimpinan Balai Kota untuk menyukkseskan proyek-proyek utama sebagai referensi mendasar dalam pergantian peristiwa teritorial. Melalui Pedoman Pimpinan Balai Kota ini diyakini pelaksanaan pendekatan-pendekatan program utama dapat terlaksana dengan baik. Kesenjangan antara pelaksanaan pendekatan dan konsekuensi proyek-proyek utama menunjukkan tidak memadainya pedoman ini.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau dikenal dengan Pro-Bebaya merupakan kebijakan yang dikeluarkan Walikota Samarinda. Merupakan program Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat pada tingkat kecamatan yang berpusat di wilayah RT dalam upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. dan masyarakat sosial. Dalam pelaksanaan nya, program ini melibatkan beberapa unsur lapisan masyarakat hingga pihak ketiga yaitu pelaku usaha serta balai-balai pelatihan yang ada di daerah Kota Samarinda.

TINJAUAN LITERATUR

Implementasi

Menurut Usman (2005:70), implementasi adalah suatu kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ini bukan sekedar aktivitas; Sebaliknya, implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Penilaian lain yang disampaikan Syaukani (2006:295), eksekusi adalah

suatu rangkaian latihan untuk menyampaikan strategi kepada daerah setempat sehingga strategi tersebut dapat membawa hasil yang sesuai dengan bentuknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada tiga tahap pelaksanaan, yaitu penyusunan, percontohan, dan pelaksanaan. Pertama dan terpenting, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan menguraikan jadwal dan tugas untuk mencapai tujuan secara terencana dan metodis sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua, menjadi teladan memerlukan komitmen untuk menjadi teladan terbaik dalam setiap tindakan pribadi yang sejati dan tidak terkesan abal-abal. Keteladanan juga mengajarkan seseorang untuk menggunakan penilaian terbaiknya dan kesadaran penuh untuk memecahkan suatu masalah sambil berusaha untuk tetap konsisten. Ketiga, implementasi merupakan langkah yang diambil dari rencana yang dikembangkan secara cermat.

Model pendekatan eksekusi strategi publik sepanjang keberadaan kemajuan studi eksekusi strategi memahami adanya dua metodologi untuk memahami eksekusi pengaturan, khususnya perspektif top down dan granular. Pendekatan command and control (pendekatan pengendalian dan komando yang mirip dengan pendekatan top down) dan pendekatan pasar (pendekatan pasar yang mirip dengan pendekatan bottom up) merupakan istilah yang digunakan oleh Lester dan Stewart (2000: 108). untuk menggambarkan konsep-konsep ini. Untuk membangun hubungan antara kebijakan dan hasil-hasilnya, setiap strategi menggunakan model kerangka kerja.

Model tersebut dikenal dengan nama model Van Meter dan Van Horn, yang diciptakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini bergantung pada pelaksanaan pendekatan untuk melanjutkan langsung dari pengaturan publik, pelaksana, dan pelaksanaan strategi publik.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier menciptakan model Mazmanian dan Sabatier, yang menegaskan bahwa implementasi adalah upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan dipecah oleh Mazmanian dan Sabatier menjadi tiga kategori: variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

Model oleh Goggin, Bowman, dan Lester. "Model komunikasi" diciptakan oleh James Lester, Ann Bowman, dan Malcolm Goggin. Dengan mengedepankan pendekatan "metode penelitian" dengan variabel independen, intervening, dan dependen serta menempatkan faktor "komunikasi" sebagai motor penggerak implementasi kebijakan, Goggin dkk. bertujuan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih "ilmiah".

Merilee S adalah model Grindle. Model besi. Hal ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh substansi penataan dan latar pelaksanaannya. Konsep dasarnya adalah implementasi kebijakan terjadi setelah transformasi kebijakan.

Richard Elmore, Benny Hjem, Michael Lipsky, dan David O'Porter secara independen mengembangkan Elmore dkk. model. Langkah pertama dalam model ini adalah mengidentifikasi aktor-aktor dalam jaringan proses layanan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak mereka.

Desain Edwardian George Edward III menekankan bahwa pengabaian implementasi adalah masalah utama administrasi publik. Ia menyatakan bahwa pembuat kebijakan tidak akan berhasil dalam melaksanakan keputusan mereka kecuali keputusan tersebut diimplementasikan secara efektif. Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, saran Edward, harus dipertimbangkan untuk implementasi kebijakan yang efektif.

Model smallwood dan Nakamura. Nakamura dan Smallwood berargumentasi bahwa proses kebijakan itu sulit, terutama jika menyangkut penerapan tindakan. Nakamura dan Smallwood menciptakan model implementasi kebijakan yang mereka sebut "lingkungan mempengaruhi implementasi." Model tersebut mempunyai tiga bagian yang masing-masing mempunyai aktor dan arena: Lingkungan I (pembentukan kebijakan), Lingkungan II (implementasi kebijakan), dan Lingkungan III (evaluasi kebijakan).

Model Jaringan. Proses implementasi kebijakan dipahami oleh model ini sebagai serangkaian interaksi yang kompleks antara sejumlah besar aktor independen dalam suatu jaringan. Bagaimana implementasinya harus dilaksanakan, permasalahan apa saja yang perlu mendapat prioritas utama, dan kebijakan apa yang diharapkan dapat memainkan peran penting, semuanya akan ditentukan oleh bagaimana para aktor dalam jaringan berinteraksi satu sama lain. Walter Kickert, Erik-Hans Klijn, dan Joop Koppenjan termasuk di antara ilmuwan yang berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman ini.

Pembangunan

Upaya sadar suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat modern dikenal dengan istilah pembangunan (S.P. 2012 oleh Siagian). Jelas dari definisi ini bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai tujuannya tanpa terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan mengambil inisiatif pembangunan daerah dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, legislatif daerah dan investasi daerahnya serta dengan memanfaatkan aset yang ada harus mempunyai pilihan untuk mensurvei aset-aset potensial yang diharapkan dapat merencanakan dan mengembangkan perekonomian provinsi.

Yang dimaksud dengan "pembangunan daerah" adalah setiap dan seluruh pembangunan yang terjadi di suatu wilayah dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terintegrasi dengan membina gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kaitan ini, pembangunan daerah bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia melalui inisiatif peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan bimbingan dari pemerintah.

Tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan menjadi

fokus pembangunan daerah. Tujuan perbaikan sementara adalah untuk membantu atau mendukung kemajuan usaha pendukung provinsi. Sasaran kemajuan yang diusung adalah membina seluruh kota di Indonesia menjadi kota mandiri melalui fase pengembangan diri dan pengembangan diri kota dengan fokus pada keselarasan kemajuan wilayah provinsi dan wilayah metropolitan, keseimbangan komitmen antara pemerintah dan masyarakat serta penggabungan secara damai antara proyek-proyek sektoral atau teritorial dengan kerjasama wilayah lokal yang memadai. disesuaikan dengan kebutuhan jaringan lingkungan dalam rangka perbaikan yang tidak memihak di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981: 64).

Probebaya

Probebaya merupakan pengembangan dari Permendagri no. 130 Tahun 2018 dan merupakan program unggulan pada masa pemerintahan Ketua DPRD Andi Harun. Prinsip pemerataan dan keadilan berlaku di seluruh wilayah Kota Samarinda dalam program ini (TWAP Kota Samarinda, 2022). Dengan memanfaatkan gotong royong dan pendekatan berbasis kewilayahan, Probebaya bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Program tersebut dilaksanakan pada tingkat perencanaan strategis dengan menyediakan dana sebesar Rp100.000.000. Bermula dari satu RT di setiap kecamatan, kemudian tersebar di 2000 RT di 59 kecamatan hingga berakhirnya masa kepemimpinan Walikota saat ini (Diskominfo Kota Samarinda, 2021). Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara bottom-up, dengan pengelolaan program dan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT. (Samarinda Pos, 2022)

Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda juga memprioritaskan program Probebaya yang bertujuan untuk membuka usaha-usaha baru yang mempekerjakan setidaknya dua hingga tiga orang di setiap lingkungan (RT) kota tersebut. Untuk mencapai pemerataan dan pemerataan pembangunan, program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Diskominfo Kota Samarinda, 2021). Kebijakan Walikota Samarinda Probebaya adalah membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi. (Helmi, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian yang disebut penelitian kualitatif berfokus pada observasi mendalam dan pengembangan teori dengan menggunakan data lapangan untuk menggambarkan kenyataan secara alami.

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mengumpulkan informasi atau apa yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Sungai Kunjang, Jalan Jakarta No.25, RT. 81 Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda. Pemilihan lokasi penelitian ini ditetapkan karena dalam proses pengambilan data primer akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan data penelitian

yaitu data yang terkait dengan program probebaya dalam melakukan pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang.

Sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara pengumpulannya: data primer dan data sekunder. Data dasar atau primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan secara langsung dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sumber atau informan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode purposive dan aksidental sampling digunakan untuk memilih informan untuk teknik tersebut. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang melengkapi data primer secara sempurna. Peneliti memperoleh informasi tambahan dari sumber yang sebenarnya, misalnya profil, dokumen informasi, baik yang didistribusikan maupun tidak dipublikasikan, atau dari hasil pemeriksaan lainnya.

Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12–14) menjadi dasar dalam proses analisis data. Ini dipecah menjadi tiga bagian: kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Kebijakan

Dimensi Kepentingan

Minat adalah area fokus pertama. Secara umum, kepentingan mengacu pada berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Salah satu target yang ingin dicapai dalam implementasi program probebaya yaitu mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern. Hal tersebut serupa dengan penjelasan kepala camat dimana program probebaya diwujudkan dengan harapan mampu memajukan pembangunan yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT.

Penyelenggaraan program Probebaya merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan dan perbaikan, khususnya terhadap infrastruktur yang ada di lingkungan RT. Setiap RT diberikan anggaran dan tanggungjawab yang sama dalam membangun wilayahnya agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan mendapatkan rasa aman saat berada di lingkungan tersebut. Peran lurah juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan kepada setiap RT yang ada di lingkungannya. Sehingga program probebaya bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Manfaat

Manfaatnya adalah fokus kedua. Isi kebijakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan keinginan untuk mewujudkan manfaat yang dapat memberikan dampak positif. Sebagai sarana mewujudkan pembangunan infrastruktur, program probebaya dilaksanakan di wilayah RT sebagai upaya melaksanakan pembangunan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan perekonomian dan hubungan sosial masyarakat.

Melalui hasil wawancara dengan kepala camat, manfaat pelaksanaan program probebaya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari

meningkatnya jumlah UMKM. Peningkatan jumlah UMKM menggambarkan masyarakat yang semakin mandiri. Dapat dilihat bahwa manfaat program probebaya sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Aspirasi masyarakat yang sebelumnya hanya sampai di musrenbang akhirnya bisa terealisasi sejak penerapan program probebaya. Setiap wilayah RT sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembangunan, antara lain dengan penyemenan gang, perbaikan drainase, perbaikan lembaga keagamaan, dan penambahan infrastruktur pendukung. Program Probebaya juga mulai menyelesaikan masalah stunting.

Derajat Perubahan

Tingkat perubahan adalah fokus ketiga. Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan hendak dicapai. Untuk menentukan sejauh mana tujuan dapat dicapai dan menghasilkan perubahan, isi kebijakan perlu memiliki skala yang jelas. Sesuai dengan jargon Kota Samarinda “Berani Berubah”, melalui program probebaya wali Kota Samarinda berupaya menciptakan perbaikan-perbaikan melalui evaluasi yang telah dilakukan sehingga hal-hal yang perlu dipertahankan dan disempurnakan mudah untuk diwujudkan. Hal itu didukung dengan penuturan kepala camat bahwa RT menjadi prioritas dalam menciptakan pembangunan karena perubahan akan dilakukan melalui tingkatan paling bawah.

Perubahan yang terjadi sejak pelaksanaan program probebaya sangat signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya mulai dapat memenuhi aspirasi masyarakat mengenai permasalahan pembangunan dan permasalahan lainnya. Sarana dan prasarana yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Lengkapnya sarana dan prasana dapat membantu dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan maupun menciptakan gerakan perubahan lainnya.

Letak Pengambilan Keputusan

Lokasi pengambilan keputusan merupakan fokus keempat. Dinamis dalam suatu strategi mempunyai peranan penting dalam melaksanakan suatu pendekatan. Di setiap RT yang melaksanakan program probebaya, pertemuan masyarakat digunakan untuk mendelegasikan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui rembug warga namun dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dalam membuat keputusan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka dan anggaran yang tersedia.

Pelaksana Program

Fokus kelima yaitu berfokus pada pelaksanaan program, dimensi ini merupakan hal yang paling utama karena menyangkut pelaksanaan dan eksekusi dari suatu program pemerintah. Dalam kaitannya dengan probebaya, proses pelaksanaan dikerjakan secara bottom up yakni pelaksanaan mulai dari tingkatan terbawah hingga ke atas. program Probebaya ini sangat melibatkan partisipasi warga masyarakat didalam pelaksanaan nya. Mulai dari tahap rembug, perencanaan hingga

pelaksanaan dilapangan sepenuhnya terdapat kontribusi yang masif dari warga masyarakat. Alur proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota secara penuh telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada oleh masyarakat.

Sumber Daya yang Terlibat

Program Probebaya di Samarinda adalah inisiatif pemerintah atau organisasi untuk mempromosikan pengembangan sumberdaya manusia, sosial dan ekonomi di kota Samarinda. Program ini melibatkan berbagai macam unsur yang ikut berpartisipasi didalam menjalankan program ini. Salah satu yang terpenting ialah sumberdaya manusia yang mana sumberdaya ini merupakan sumberdaya yang paling ber peran vital untuk mensukseskan tujuan daripada program probebaya tersebut.

Peranan terpenting dari berjalan nya program ini ialah keterlibatan dari sumberdaya manusia yang menjadi kunci suksesnya program ini. Program ini melibatkan penduduk setempat yang menjadi subjek program, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi mereka.

Konteksi Implementasi

Dimensi Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Sektor swasta, masyarakat, dan komponen internal pemerintah semuanya terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek kebijakan. Upaya bersama yang terjalin menjadikan program ini berjalan sesuai dengan kepercayaan otoritas publik. Setidaknya ada beberapa lintas sektor yang berperan terhadap kebijakan program ini. kolaborasi dan sinergitas antar instansi, LSM dan warga masyarakat mempunyai satu kepentingan yang sama yaitu mensukseskan jalannya program Probebaya sesuai dengan tupoksi dan wewenang mereka masing-masing. Hal ini merupakan strategi yang digunakan oleh Walikota dalam membantu kelancaran program nya dan terbukti efektif dalam terealisasinya program Probebaya sebagai program unggulannya.

Dimensi Karakteristik Lembaga

Karakteristik lembaga merupakan salah satu faktor pendukung yang menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kota Samarinda didalam menjalankan program Probebaya. Karakteristik sangat erat kaitan nya dengan ciri khas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota serta sumberdaya yang dimiliki nya sebagai penunjang kegiatan Probebaya. karakteristik yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda sebagai pelaksana Program ini sangat dinamis dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan program ini. Komitmen internal organisasi, leadership dan sistem manajemen yang efektif menjadi kunci suksesnya program ini jika dilihat dari sudut pandang karakteristik lembaga.

Dimensi Kepatuhan dan Daya Tanggap

Konsistensi dan daya tanggap menjadi penting ketika aturan-aturan yang disusun mengenai suatu program telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana strategi. Dalam Prokebaya, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mengukur tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi program Prokebaya. Berbagai bentuk usaha yang dilakukan pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah menginginkan kepuasan yang ada di masyarakat dalam merespon kebijakan yang dibuat khusus sebagai program unggulan untuk mengatasi permasalahan masyarakat Kota Samarinda yang selama ini di periode Walikota sebelumnya sangat minim mendapatkan anggaran pembangunan khususnya di tingkatan terbawah seperti ketua RT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil perbincangan yang telah selesai, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Prokebaya untuk perbaikan di Daerah Sungai Kunjang Kota Samarinda diperkirakan dari tinjauan focal point Tori Marilee S. Isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya adalah indikator implementasi kebijakan Grindle. Program prokebaya yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya pembangunan dan perbaikan khususnya infrastruktur yang ada di lingkungan RT menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Manfaat program prokebaya sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Perubahan yang terjadi sejak pelaksanaan program prokebaya sangat signifikan. Pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui rembug warga namun dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Program prokebaya ini sangat melibatkan partisipasi warga masyarakat didalam pelaksanaannya. Peranan terpenting dari berjalan nya program ini ialah keterlibatan dari sumberdaya manusia yang menjadi kunci suksesnya program ini.

Kolaborasi dan sinergitas antar instansi, LSM dan warga masyarakat mempunyai satu kepentingan yang sama yaitu mensukseskan jalannya program Prokebaya sesuai dengan tupoksi dan wewenang mereka masing-masing. Karakteristik yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda sebagai pelaksana Program ini sangat dinamis dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan program ini. Usaha yang dilakukan pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah menginginkan kepuasan yang ada di masyarakat dalam merespon kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, maka penelitian ini memberikan beberapa masukan dan saran bahwa pemerintah atau pihak terkait perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program. Hubungan antara instansi, LSM dan warga masyarakat perlu terus dibangun agar semua pihak saling mendukung dalam proses pelaksanaan

program. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi program inovatif yang mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Usman. (2005). Pengolahan Citra Digital dan Teknik Pemrogramannya. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lester, James P., Stewart, Joseph. (2000). Public Policy an Evolutionary Approach, Wadsworth, Stamford, USA.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Siagian. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. (2006). Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.